

LAPORAN KINERJA 2023

DEPUTI BIDANG
KOORDINASI PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat, bimbingan, dan karunia-Nya, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan ini merupakan laporan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2023 dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan ini juga merupakan salah satu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Sekretariat Deputy dan Lima Asisten Deputy, yaitu Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak lepas dari bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan laporan kinerja ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih ada kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Mei 2024
Deputy Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Ttd.

Odo R. M. Manuhutu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkesinambungan, maka Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178/S Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi

Pada tahun 2023 terdapat perubahan konsep Perjanjian Kinerja di lingkup Kemenko Marves. Jika sebelumnya penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC), saat ini penyusunan Perjanjian Kinerja menggunakan pendekatan Logical Framework Analysis (LFA). Perubahan terutama pada pembagian perspektif, jika pada metode BSC sasaran strategis dibagi menjadi empat perspektif (stakeholder, customer, internal business, dan learning and growth), pada metode LFA tidak menggunakan perspektif. Selain itu juga terdapat perubahan indikator kinerja menyesuaikan masukan dari Kementerian PANRB agar indikator kinerja Kemenko Marves menggambarkan tugas dan fungsi sebagai Kementerian Koordinator dan memiliki rentang kendali yang kuat.

Adapun perubahan metodologi dan nomenklatur pada sasaran dan indikator kinerja tersebut hanya diterapkan pada Perjanjian Kinerja, sedangkan Renstra tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan untuk perubahan Renstra harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2022. Meskipun terjadi perubahan pada nomenklatur dan format pada Perjanjian Kinerja, secara substansi muatan sasaran program dan indikator kinerja

tetap mengacu pada sasaran strategis dan indikator pada Renstra. Berikut perbandingan sasaran dan indikator kinerja pada Renstra dan pada Perjanjian Kinerja:

Tabel 1. Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra dan PK
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Renstra 2020-2024		Perjanjian Kinerja 2023	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja
Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing	Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata
	% Kontribusi PDB Pariwisata		Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN
Terbangunnya destinasi pariwisata Prioritas nasional	Jumlah tata Kelola Destinasi		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih		
Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan	Jumlah Tata Kelola Pariwisata		
Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif		
Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif	Nilai Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian	Jumlah Produk/Jasa yang difasilitasi mendaftar Kekayaan Intelektual		

atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan terlatih		
Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti
	Presentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan		Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan
Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase SDM Deputy yang sesuai Kompetensinya	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Evaluasi SAKIP Deputy		Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Nilai PMPRB Deputy		
Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai IKPA Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

Secara keseluruhan, capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 sebesar 109,83%. Seluruh target indikator kinerja telah tercapai bahkan pada tiga indikator kinerja memiliki capaian melebihi target. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata sebesar 120%;
2. Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/ Lembaga, Pemda, dan

BUMN sebesar 120%;

3. Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti sebesar 100%;
4. Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan sebesar 100%;
5. Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 100%; dan
6. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 105%.

Pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 berdasarkan DIPA nomor: DIPA-120.01-0/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp15.500.000.000 yang terdiri dari Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp13.300.000.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.200.000.000. Sebagaimana arahan Presiden pada penyerahan DIPA 2023, kebijakan Automatic Adjustment pada 2023 kembali diberlakukan. Adapun besaran Automatic Adjustment pada Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.053.049.000 sehingga pagu efektif Rp14.446.951.000. Selanjutnya diusulkan pembukaan blokir ke Kementerian Keuangan dan disetujui pada bulan Agustus 2024.

Pagu Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah pembukaan blokir adalah Rp15.499.506.000. Pada Oktober 2023, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperoleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp1.267.910.000 untuk kegiatan Koordinasi Penguatan Implementasi Bangsa Buatan Indonesia sehingga pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp16.767.416.000. Realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2023 sebesar Rp16.758.329.233 (99,95%) dari pagu sebesar Rp16.767.416.000.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Sasaran Program.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja	10
B. Penghitungan Capaian Kinerja	11
C. Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja	14
B. Realisasi Anggaran.....	17
C. Analisa Kinerja.....	18
1. Sasaran Program 1: Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	18
2. Sasaran Program 2: Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas	26
3. Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	50
D. Capaian Kinerja Lainnya	53
E. Analisis Kondisi Sumber Daya Pegawai	55
F. Analisis Sumber Daya Anggaran	56
G. Efisiensi Sumber Daya.....	57
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Langkah Perbaikan Kedepan.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Permenko 10 Tahun 2020	3
Gambar 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 2020-2023	17
Gambar 3. Kontribusi Klaster PDB Kemaritiman Tahun 2022	20
Gambar 4. Kontribusi Klaster Wisata Bahari	20
Gambar 5. Pertumbuhan klaster wisata bahari	21
Gambar 6. Jumlah Produk Tayang di E-Katalog	24
Gambar 7. Hasil Penilaian Indeks Pariwisata Berkualitas (Skala 1 – 100)	27
Gambar 8. Grafik perkembangan investasi PMDN dan PMA pada sektor pariwisata di Indonesia (2017-2022)	31
Gambar 9. Klasifikasi Pengembangan SDM Pariwisata 2025-2030	37
Gambar 10. Status Perkembangan Lima DPSP 2021 – 2023	40
Gambar 11. Indeks Pariwisata Berkualitas Lima DPSP dan Bali	41
Gambar 12. Simulasi wisatawan nusantara dan dampak langsung terhadap PDB ADHB	47
Gambar 13. Bagan Kelompok Kerja Program BBWI	48
Gambar 14. Perkembangan Nilai SAKIP Deputi 5	51
Gambar 15. Perizinan Penyelenggaraan Event	52
Gambar 16. Pembukaan Kegiatan ACE-YS oleh Menko Marves Ad Interim	53
Gambar 17. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 2020-2023	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra dan PK Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	iv
Tabel 1. Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra dan PK Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7
Tabel 3. Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023	10
Tabel 4. Rincian Pagu Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2023	11
Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 6. Pembobotan Kualitas Indikator Kinerja	14
Tabel 7. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi	15
Tabel 8. Realisasi Anggaran Triwulan IV 2023	16
Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran 2020-2023	17
Tabel 10. Capaian IKU Ultimate Outcome tahun 2023	18
Tabel 11. Indikator Ekonomi Maritim Klaster Wisata Bahari	21
Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Belanja PDN	24
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti	26
Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti	26
Tabel 15. Agenda Pelaksanaan Penyusunan RUU PBJ Publik	46
Tabel 16. Hasil Penilaian Internal SAKIP 2023	50
Tabel 17. Rekapitulasi Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	54
Tabel 18. Daftar Pegawai Baru Deputi 5	55
Tabel 19. Realisasi Anggaran Triwulan IV 2023	55
Tabel 20. Pagu dan Realisasi Anggaran 2020-2023	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri Sekretariat Deputy dan Lima Asisten Deputy, yaitu; Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Asisten Deputy Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur dengan indikator kinerja (IK) yang dirinci sesuai target waktu yang ditetapkan. Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2023, unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki tiga Sasaran Program (SP), yang dijabarkan dalam enam indikator kinerja.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 ini menjelaskan tentang kegiatan unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2023 dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2023. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam mendukung peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

B. Tugas dan Fungsi

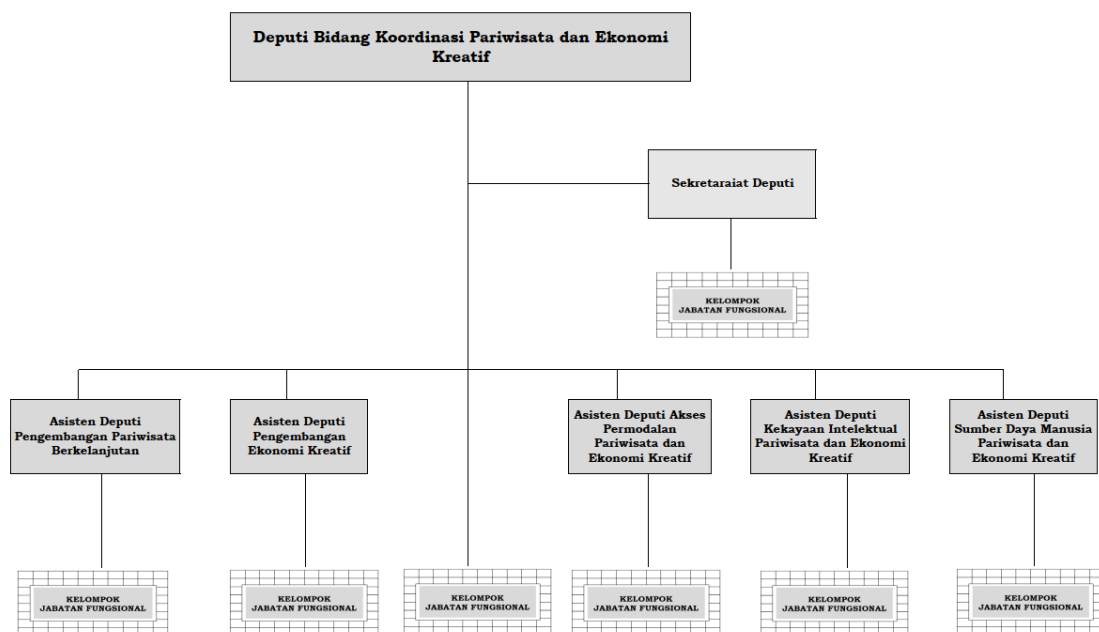
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
- c. Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- f. Asisten Deputy Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Permenko 10 Tahun 2020

1. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran dan capaian kinerja;
 - c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
 - d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;
 - e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
 - f. koordinasi penyusunan laporan; dan
 - g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan serta memiliki fungsi, yaitu:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan;
 - a. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan; dan
 - b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.
3. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif;
 - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif.
4. Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang akses permodalan pariwisata dan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan.

5. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual.

6. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

bidang kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.

C. Sasaran Program

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 diarahkan untuk:

- a. Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan
- b. Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif
- c. Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif
- d. Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

Pada tahun 2023 terdapat perubahan konsep Perjanjian Kinerja di lingkup Kemenko Marves. Jika sebelumnya penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis mengadopsi metodologi Balanced Scorecard (BSC), saat ini penyusunan Perjanjian Kinerja menggunakan pendekatan Logical Framework Analysis (LFA). Perubahan terutama pada pembagian perspektif, jika pada metode BSC sasaran strategis dibagi menjadi empat perspektif (stakeholder, customer,

internal business, dan learning and growth), pada metode LFA tidak menggunakan perspektif. Selain itu juga terdapat perubahan indikator kinerja menyesuaikan masukan dari Kementerian PANRB agar indikator kinerja Kemenko Marves menggambarkan tugas dan fungsi sebagai Kementerian Koordinator dan memiliki rentang kendali yang kuat.

Adapun perubahan metodologi dan nomenklatur pada sasaran dan indikator kinerja tersebut hanya diterapkan pada Perjanjian Kinerja, sedangkan Renstra tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan untuk perubahan Renstra harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2022. Meskipun terjadi perubahan pada nomenklatur dan format pada Perjanjian Kinerja, secara substansi muatan sasaran program dan indikator kinerja tetap mengacu pada sasaran strategis dan indikator pada Renstra. Berikut perbandingan sasaran dan indikator kinerja pada Renstra dan pada Perjanjian Kinerja:

Tabel 2. Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra dan PK
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Renstra 2020-2024		Perjanjian Kinerja 2023	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja
Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing	Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata
	% Kontribusi PDB Pariwisata		Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN
	Jumlah tata Kelola Destinasi		
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih		
Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan	Jumlah Tata Kelola Pariwisata		

Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif		
Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif	Nilai Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Produk/Jasa yang difasilitasi mendaftar Kekayaan Intelektual		
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan terlatih		
Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti
	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan		Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan
Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Deputy yang sesuai Kompetensinya	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Evaluasi SAKIP Deputy		Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Nilai PMPRB Deputy		

Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai IKPA Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
--	---	--	--

Sumber: Dokumen Renstra Deputi 5 2020-2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 2024

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.
- Bab II: Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis, target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.
- Bab III: Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis untuk periode tahun 2023 berikut dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.
- Bab IV: Penutup. Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama 2023. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan pada laporan kinerja tahunan selanjutnya.
- Lampiran. Berisi dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan penghitungan pencapaian Indikator Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023, terdapat tiga Sasaran Program dengan enam Indikator Kinerja. Rincian Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SP. 1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing	1	Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata	3%
		2	Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN	Rp950 T
SP. 2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas	3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti	100%
		4	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	90%
SP. 3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	5	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%
		6	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	71

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja 2023

B. Penghitungan Capaian Kinerja

1. IKU 1. Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata diukur berdasarkan selisih perhitungan kontribusi klaster wisata bahari terhadap nilai PDB Kemaritiman pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
2. IKU 2. Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN diukur berdasarkan perhitungan belanja produk dalam negeri K/L, Pemda, dan BUMN yang dilakukan oleh LKPP.
3. IKU 3. Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti diukur berdasarkan jumlah rekomendasi kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang diusulkan.
4. IKU 4. Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan diukur berdasarkan capaian penyelesaian isu strategis yang terdapat dalam RPJMN, Janji Presiden, dan Direktif Presiden.
5. IKU 5. Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Inspektorat.
6. IKU 6. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan hasil penilaian implementasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Inspektorat.

C. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 berdasarkan DIPA nomor: DIPA-120.01-0/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp15.500.000.000 yang terdiri dari Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp13.300.000.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.200.000.000. Rincian anggaran unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rincian Pagu Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2023

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)
----	------------	-----------

1	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.200.000.000
2	Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	2.401.350.000
3	Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif	2.425.000.000
4	Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.025.000.000
5	Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.025.000.000
6	Asisten Deputy Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.025.000.000
7	RO Lintas Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.398.650.000
Total Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2023		15.500.000.000

Sumber: DIPA 2023

Sebagaimana arahan Presiden pada penyerahan DIPA 2023, kebijakan Automatic Adjustment pada 2023 kembali diberlakukan. Kemenko Marves mendapat blokir Automatic Adjustment sebesar Rp24.147.341.000. Adapun besaran Automatic Adjustment pada Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.053.543.000 sehingga pagu efektif Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga awal triwulan III sebesar Rp14.446.457.000.

Selanjutnya sesuai dengan nota dinas Sekretaris Kementerian Koordinator tanggal 29 Agustus 2023, disampaikan bahwa usulan pembukaan blokir Automatic Adjustment telah disetujui Kementerian Keuangan dan telah masuk DIPA Kemenko Marves. Besaran blokir AA yang kembali ke pagu Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.053.049.000.

Pada awal triwulan IV usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.267.910.000 telah disetujui Kementerian Keuangan. ABT dimaksud untuk kegiatan Koordinasi Penguatan Implementasi Bangsa Buatan Indonesia 2023. Dengan adanya tambahan anggaran ini, total pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2023 sebesar Rp16.767.416.000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didasarkan pada Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Process Perspective dan Learning and Growth Perspective Tahun 2022.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa terdapat perubahan konsep Perjanjian Kinerja yang di dalamnya memuat sasaran dan indikator kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023. Namun tidak ada perubahan pada Renstra Kemenko Marves dan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara umum, substansi muatan sasaran program dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tetap mengacu pada sasaran strategis dan indikator pada Renstra. Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		2023		%	REALISASI 2022	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)
			TARGET	REALISASI			
SP1. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing	1	Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata	3%	19,88% *	120%**	N/A***	N/A***
	2	Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/ Lembaga,	Rp950 T	Rp1.34 9 T	120%**	Rp762, 75 T	N/A***

		Pemda, dan BUMN					
SP2. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas	3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	70%	100%
	4	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	90%	90%	100%	N/A***	N/A***
SP3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	5	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%	90,27% ****	100%	90,27%	90%
	6	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	71	74,80	105%	70,40	80

Sumber: Laporan Kinerja 2022 dan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024

* : perhitungan PDB Maritim menggunakan data N-2 dan N-1 tahun berjalan

** : digunakan capaian maksimal 120%

***: tidak terdapat target pada Renstra dan Perjanjian Kinerja tahun 2022

****: menggunakan realisasi tahun 2022 karena tidak dilakukan penilaian pada 2023

Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dilakukan berdasarkan pembobotan kualitas indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 6. Pembobotan Kualitas Indikator Kinerja

Kualitas Indikator Kinerja	Bobot
Ultimate Outcome	0,4
Intermediate Outcome	0,3
Immediate Outcome	0,2

Sumber: Kepmenko 179/S Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Kemenko Marves

Adapun perhitungan NKO Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

No	Indikator Kinerja	Capaian	Bobot	Koefisien	Nilai
1	Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata	120%	0,4	0,22	26,67
2	Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/ Lembaga, Pemda, dan BUMN	120%	0,4	0,22	26,67
3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti	100%	0,2	0,11	11,11
4	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	0,2	0,11	11,11
5	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	0,3	0,17	16,72
6	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	105%	0,3	0,17	17,56
Nilai Kinerja Organisasi					109,83%

Berdasarkan perhitungan NKO di atas, diperoleh capaian NKO Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 sebesar 109,83%. Secara umum, realisasi seluruh indikator kinerja telah memenuhi target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Bahkan pada beberapa indikator telah melebihi target, yakni pada pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata, Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/ Lembaga, Pemda, dan BUMN, dan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pada tahun 2022 belum dilakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi. Capaian kinerja dihitung per masing-masing indikator kinerja, sehingga tidak diketahui capaian NKO secara keseluruhan. Selain itu, terdapat perubahan metodologi dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan menggunakan metode Logical Framework Approach (LFA) sedangkan tahun 2022 dan periode sebelumnya menggunakan Balanced Scorecard (BSC). Sehubungan

dengan hal tersebut, tidak dapat dibandingkan secara langsung NKO tahun 2023 dengan 2022.

Perbandingan capaian dapat dilakukan pada indikator kinerja yang sama pada 2022 dan 2023 yakni nilai belanja produk dalam negeri dan nilai SAKIP. Realisasi belanja produk dalam negeri K/L dan BUMN pada 2022 sebesar Rp431,38 T sedangkan pada 2023 sebesar Rp1.349,78 T, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada 2023. Peningkatan juga terjadi pada nilai SAKIP, pada 2022 sebesar 70,40 meningkat menjadi 74,80 pada 2023.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2023 sebesar Rp16.758.329.233 (99,95%) dari total pagu sebesar Rp16.767.416.000. Adapun rincian realisasi per Unit Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Anggaran Triwulan IV 2023

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Deputi 5	16.767.416.000	16.758.329.233	9.086.767	99.95%
Asdep 1	2.036.997.000	2.036.683.635	313.365	99.98%
Asdep 2	2.102.327.000	2.101.979.211	347.789	99.98%
Asdep 3	1.755.436.000	1.755.262.072	173.928	99.99%
Asdep 4	1.832.735.000	1.832.557.332	177.668	99.99%
Asdep 5	1.659.548.000	1.659.306.671	241.329	99.99%
RO 6	4.047.397.000	4.042.504.501	4.892.499	99.88%
Sesdep	2.065.162.000	2.063.396.997	1.765.003	99.91%

Sumber: SAKTI

Jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya, yakni tahun 2020-2022, terdapat peningkatan pagu dan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023, setelah sebelumnya mengalami penurunan realisasi anggaran pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran pada 2023 dilakukan secara optimal untuk menghasilkan output. Pada 2022 terjadi penurunan realisasi anggaran karena adanya pembukaan blokir Automatic Adjustment dan persetujuan Anggaran Belanja Tambahan menjelang akhir tahun. Hal ini menyebabkan kesulitan

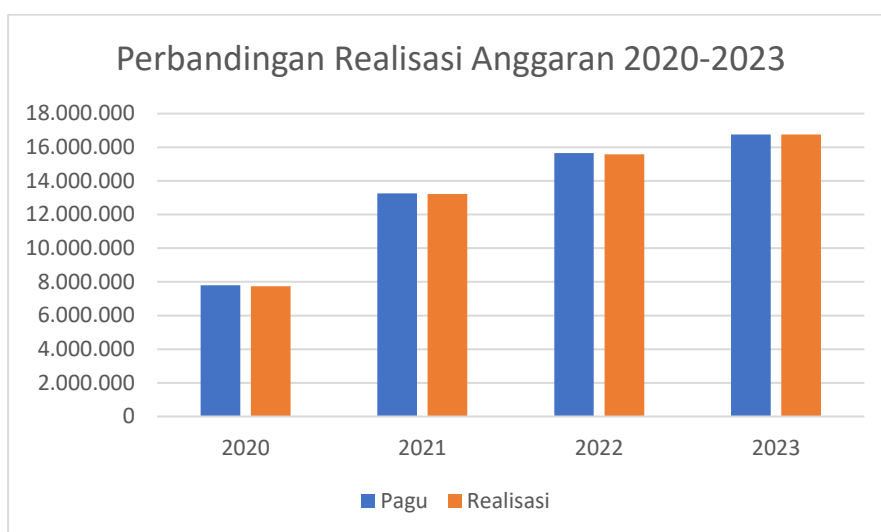
dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran 2020-2023

TAHUN	2020	2021	2022	2023
PAGU*	7.800.000	13.251.972	15.661.698	16.767.416
REALISASI*	7.735.232	13.211.945	15.572.642	16.758.329
%	99.20%	99.70%	99.43%	99.95%

*Dalam ribuan

Sumber: SAKTI (diolah)



Gambar 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 2020-2023
Sumber: SAKTI (diolah)

C. Analisa Kinerja

1. Sasaran Program 1: Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing

Sasaran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif yang berdaya saing untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran program ini diukur berdasarkan dua indikator kinerja, yaitu (a) pertumbuhan PDB Kemaritiman Kaster Pariwisata, dan (b) Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN.

Indikator kinerja pada sasaran ini memiliki level ultimate outcome dengan bobot sebesar 0,4 dari total capaian kinerja. Kedua Indikator Kinerja ini ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun capaian IKU pada 2023 sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10. Capaian IKU Ultimate Outcome tahun 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata dan Indikator	3%	19,88%	120%
2	Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN	Rp950 T	Rp1.349 T	120%

a. IKU 1: Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata

Kontribusi PDB Kemaritiman menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia, khususnya terkait Pilar Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan. Hal ini tercantum dalam Perpres Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2021-2025.

Penyusunan PDB Maritim Indonesia didahului dengan penyusunan klasifikasi yang dapat menentukan cakupan dari PDB Maritim. Terdapat beberapa perbedaan penyusunan PDB Maritim Indonesia pada periode tahun 2017-2021 dengan PDB Maritim pada periode tahun 2010-2016. Klasifikasi untuk PDB Maritim periode tahun 2010-2016 yang telah diliris pada tahun 2017 didasarkan pada UU 32/2014 tentang Kelautan dan Dutch Maritime Cluster yang terdapat 9 klaster dengan total cakupan 195 KBLI. Sementara itu, PDB Maritim periode tahun 2017-2021 didasarkan pada framework Ocean Accounts tahun 2019 yang terdapat 12 klaster dengan total cakupan 374 KBLI. Perbedaan ini disebabkan pada tahun penyusunan PDB Maritim 2010-2016 belum terdapat framework internasional yang mendasari penyusunan PDB Maritim, sedangkan penyusunan PDB Maritim 2017- 2021 menggunakan framework yang sudah terstandardisasi secara internasional.

Adapun cakupan 12 klaster kemaritiman berdasarkan aktivitas (KBLI kemaritiman) dirinci sebagai berikut:

- 1) Perikanan dan Budidaya Maritim dengan 61 industri
- 2) Sumber Daya Energi Maritim dengan 4 industri
- 3) Pertambangan dan Penggalan Maritim dengan 31 industri

- 4) Industri Pembuatan, Pemeliharaan dan Jasa Perbaikan Kapal dengan lima industri
- 5) Energi Baru dan Terbarukan Maritim dengan 11 industri
- 6) Konstruksi Maritim dengan 39 industri
- 7) Transportasi dan Aktivitas Penunjang Maritim dengan 54 industri
- 8) Wisata Bahari dengan 56 industri
- 9) Jasa Maritim dengan 47 industri
- 10) Industri Pengolahan Maritim dengan 19 industri
- 11) Industri Kemaritiman Lainnya dengan 29 industri
- 12) Perdagangan Maritim dengan 18 industri

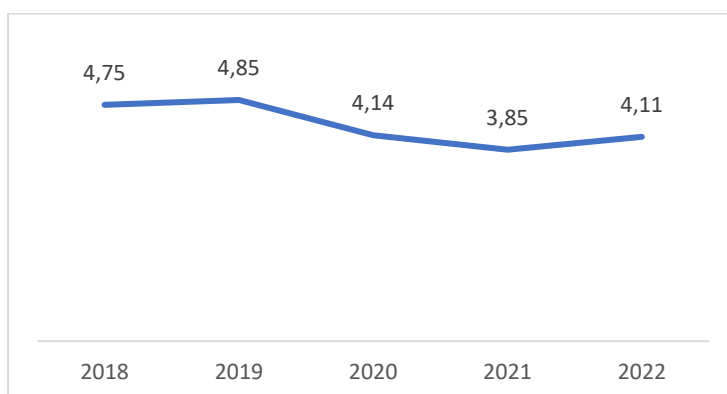
Pada Tahun 2023, Kontribusi PDB Kemaritiman terhadap PDB nasional ditargetkan sebesar 7,7. Angka ini ditetapkan dengan menggunakan pendekatan penghitungan yang dilakukan oleh BPS sebagai instansi resmi pemerintah melakukan perhitungan PDB maritim. Nilai nominal PDB Kemaritiman atas harga dasar berlaku selama kurun waktu 2017-2021 cenderung meningkat. Nilai tambah ekonomi kemaritiman pada tahun 2022 mencapai Rp1.551,2 triliun atau sebesar 7,92% dibandingkan PDB Nasional.

Selama kurun waktu 2017-2022, terdapat tiga klaster maritim yang secara konsisten berkontribusi dominan terhadap pembentukan PDB Kemaritiman. Ketiga klaster tersebut adalah perikanan dan budi daya maritim, sumber daya energi maritim, serta transportasi dan aktivitas penunjang maritim. Tahun 2017, sumber daya energi maritim menjadi kontributor tertinggi terhadap PDB Kemaritiman yaitu sebesar 27,90%; diikuti oleh perikanan dan budi daya maritim sebesar 25,98%, serta transportasi dan aktivitas penunjang maritim sebesar 9,46%. Sementara untuk klaster maritim lainnya berkontribusi sebesar 34,60%.



Gambar 3. Kontribusi klaster PDB Kemaritiman tahun 2022
Sumber: Hasil Perhitungan PDB Kemaritiman 2022 (BPS)

Seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, tahun 2022, sumber daya energi maritim masih menjadi kontributor tertinggi terhadap PDB Kemaritiman yaitu sebesar 26,49%; diikuti oleh perikanan dan budi daya maritim sebesar 25,84%, serta industri kemaritiman lainnya sebesar 11,73%. Sementara untuk klaster wisata bahari berkontribusi sebesar 4,11%. Dalam rentang tahun 2017-2022 kisaran distribusi klaster wisata bahari terhadap PDB Kemaritiman di antara 3-5%.



Gambar 4. Kontribusi klaster wisata Bahari (%)
Sumber: Hasil Perhitungan PDB Kemaritiman 2022 (BPS)

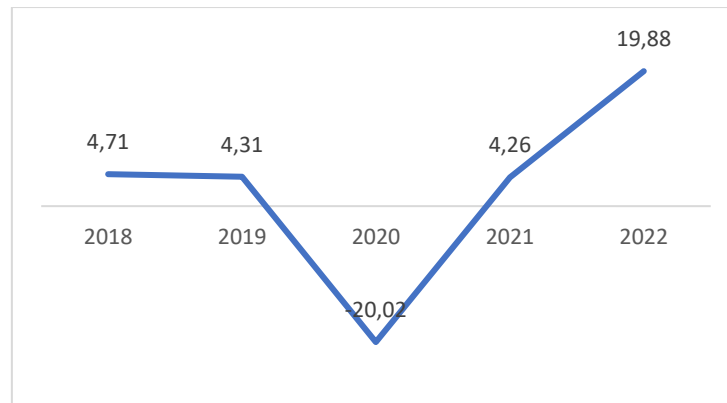
Klaster Wisata Bahari mencakup usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Dalam kurun waktu 2017- 2022, nilai tambah yang

tercipta pada klaster ini cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, nilai tambah yang tercipta pada klaster ini sebesar 56,05 triliun rupiah atas dasar harga berlaku. Nilai tambah pada klaster ini sempat turun pada tahun 2020 menjadi 49,49 triliun rupiah. Namun, nilai tambah klaster ini meningkat hingga mencapai 63,76 triliun rupiah pada tahun 2022. Serupa dengan ini, nilai tambah atas dasar harga konstan juga cenderung meningkat. Nilai tambah atas dasar harga konstan yang tercipta pada tahun 2017 sebesar 40,54 triliun rupiah, kemudian menurun menjadi 44,21 triliun rupiah pada tahun 2021. Nilai tambah atas dasar harga konstan klaster ini pada tahun 2022 telah melebihi nilai pada prapandemi. Hal ini menunjukkan mulai pulihnya sektor pariwisata pasca pandemi.

Tabel 11. Indikator Ekonomi Maritim Klaster Wisata Bahari

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
NTB Harga Berlaku (miliar Rp)	56.045,8	59.201,1	62.363,4	49.487,7	51.569,8	63.765,6
NTB Harga Konstan (miliar Rp)	40.538,8	42.449,4	44.295,2	35.418,1	36.678,6	44.212,5

Berdasarkan nilai tambah harga konstan, diperoleh nilai pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Wisata Bahari pada 2022 sebesar 19,88%, jauh melebihi pertumbuhan pada 2021 sebesar 4,26%. Hal ini menunjukkan tren positif pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata pasca pandemi.



Gambar 5. Pertumbuhan klaster wisata bahari (%)

Hasil perhitungan PDB maritim menunjukkan tren peningkatan nilai ekonomi di sektor maritim. Hal ini tercermin dari nilai nominal PDB Kemaritiman atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2017 – 2022 cenderung meningkat. Nilai PDB maritim tercatat meningkat dari 1.074,0 triliun rupiah di 2017 menjadi Rp1.551,2 triliun atau sebesar 7,92% terhadap PDB nasional. Meskipun demikian, secara pertumbuhan kinerja sektor maritim masih belum optimal. Data hasil perhitungan menunjukkan, dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan PDB maritim belum mampu melewati pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pada saat pandemi tahun 2020, laju pertumbuhan PDB Kemaritiman juga menurun lebih dari PDB Nasional. Hal ini menandakan bahwa aktivitas kemaritiman rentan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat secara luas.

Adapun rata-rata pertumbuhan PDB maritim masih cukup rendah, yaitu sekitar 2% (yoy). Fakta ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan PDB maritim yang lebih optimal sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi domestik. Adapun pertumbuhan PDB Kemaritiman klaster wisata bahari menunjukkan kenaikan dari masa pandemi. Pada 2022 nilai pertumbuhan klaster wisata bahari sebesar 19,88%.

- b. IKU 2: Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait dengan nilai belanja produk dalam negeri dari K/L, pemda, dan BUMN dengan target minimal Rp950 triliun pada 2023. Program ini biasa disebut dengan Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia.

Tujuan utama program ini adalah mengubah perilaku belanja pemerintah dan masyarakat untuk memprioritaskan produk barang dan jasa dalam negeri terutama produk UMK-Koperasi, utamanya pada sektor ekonomi kreatif. Perubahan ini akan berdampak signifikan pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada 2021, peran konsumsi domestik masyarakat sebesar 53% dan pemerintah sebesar 9%. BPS menyebutkan bahwa impor menjadi penekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Implementasi kedua program ini untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3% atau lebih.

Pada 2023, program dan rencana kerja Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri memiliki target utama belanja produk dalam negeri minimal 95% dari anggaran belanja barang dan jasa atau senilai minimal Rp 1.171 triliun. Dalam rangka mendukung capaian target tersebut, perlu diimplementasikan beberapa target turunan, yaitu:

- 1) pelaksanaan empat kali temu bisnis;
- 2) peningkatan jumlah produk tayang di e-katalog menjadi 5 juta produk;
- 3) pencapaian target belanja pemerintah melalui e-katalog minimal Rp500 triliun; dan
- 4) mengimplementasikan seluruh arahan Presiden pada Inpres Nomor 2 Tahun 2022.

Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang lebih intensif untuk monitoring dan evaluasi implementasi Inpres 2/2022. Keseluruhan strategi ini memerlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, serta seluruh entitas pendukungnya.

Berdasarkan data LKPP per 31 Desember 2023, komitmen belanja produk dalam negeri oleh K/L, pemda, dan BUMN senilai Rp 1.301,93 triliun, sedangkan realisasi K/L, pemda, dan BUMN senilai Rp 1.349,78 triliun. Adapun rincian capaian sebagai berikut:

- 1) komitmen belanja PDN oleh K/L dan pemda yang tercatat pada LKPP sebesar Rp772,42 triliun dan terealisasi sebesar Rp571,33 triliun (73,94%);
- 2) komitmen belanja produk dalam negeri oleh top 10 BUMN sebesar Rp 530,59 triliun dan terealisasi sebesar Rp778,45 triliun (146,71%).

Sebanyak 542 Pemda telah menayangkan produk di e-katalog lokal. Data per 18 Desember 2023, produk tayang di e-katalog telah mencapai 6.902.759 produk atau 138,05% dari target lima juta produk pada 2023. Adapun rincian sebagai berikut: (i) jumlah produk katalog nasional sebanyak 1.461.691 produk, (ii) jumlah produk katalog lokal sebanyak 4.473.864 produk, dan (iii) jumlah produk katalog sektoral sebanyak 967.204 produk.



Gambar 6. Jumlah Produk Tayang di E-Katalog

Sumber: LKPP, 18 Desember 2023

Capaian belanja PDN tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Realisasi belanja PDN Kementerian/Lembaga, Pemda dan BUMN pada 2022 sebesar Rp762,75 triliun sedangkan pada 2023 sebesar Rp1.349,78 triliun. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja pada 2023 dengan capaian tahun

2022 dan target pada 2024 sesuai Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Belanja PDN

Indikator Kinerja	Realisasi		Target	
	2022	2023	2024	RPJMN
Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN	Rp762,75 T	Rp1.349,78 T	-	-

Sumber: LKPP 2022-2023

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pencapaian peningkatan belanja PDN adalah peningkatan produk yang bersertifikasi TKDN, peningkatan jumlah produk substitusi impor, pemerataan ketersediaan jumlah produk berdasarkan sektor, dan peningkatan produk dengan merek dalam negeri.

2. Sasaran Program 2: Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas

Sasaran Program ini diukur dengan indikator Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti dan Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan. Indikator kinerja pada sasaran ini memiliki level immediate outcome dengan bobot 0,2. Adapun rincian indikator kinerja sebagai berikut:

a. IK 3: Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja ini menggambarkan tingkat pelaksanaan kebijakan terkait isu yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Kementerian/Lembaga. Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kebijakan yang Dihasilkan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 terdapat lima rancangan kebijakan yang ditargetkan menjadi output Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rancangan Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di DPSP;
- 2) Rancangan Kebijakan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 3) Rancangan Kebijakan Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- 5) Rancangan Kebijakan Pengembangan Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Capaian indikator kinerja persentase rancangan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja pada 2023 dengan capaian tahun 2022 dan target pada 2024 sesuai Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti

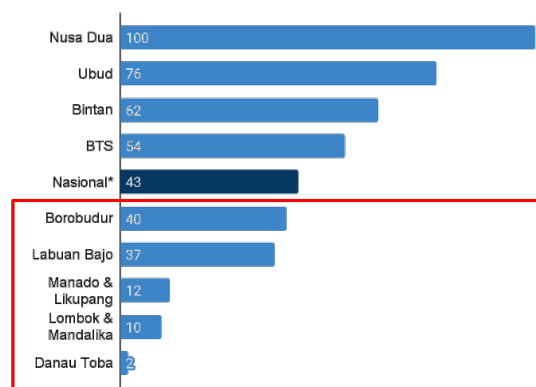
Indikator Kinerja	Realisasi		Target	
	2022	2023	2024	RPJMN
Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	-

Adapun penjelasan dari masing-masing rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di DPSP

Tujuan penyusunan rancangan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan terutama di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Dalam menyusun rancangan kebijakan ini, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian melalui Sekretariat Bersama yang telah diatur dalam Kepmenko Nomor 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 109 Tahun 2019 tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata. Sejak 2019 hingga saat ini, Sekretariat Bersama secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas isu-isu strategis pariwisata nasional.

Sejak 2020 hingga saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas. Pengembangan lima destinasi turut mengikuti trend pariwisata saat ini yaitu pariwisata berkualitas. Trend ini menciptakan tata kelola pariwisata yang bermutu dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pariwisata melihat trend ini menjadi strategi utama upaya pengembangan lima destinasi pariwisata.



Gambar 7. Hasil Penilaian Indeks Pariwisata Berkualitas (Skala 1 – 100)
Sumber: Sekretariat Bersama Pariwisata (2022)

Sekretariat Bersama Pariwisata telah melakukan evaluasi penerapan pariwisata berkualitas di berbagai destinasi wisata pada akhir 2022. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data bahwa nilai indeks pariwisata di

lima destinasi pariwisata super prioritas masih di bawah rerata nasional (Gambar 1). Hal tersebut menjadi isu lebih lanjut yang perlu ditangani antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan nilai indeks di lima destinasi pariwisata super prioritas.

Target Sekretariat Bersama tahun 2023 adalah tersusunnya buku insight report atau meta data dari penilaian indikator pariwisata berkelanjutan yang mengadopsi komponen dari penilaian Travel and Tourism Development Index (TTDI). Secara umum, hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa dalam pengembangan pariwisata berkualitas perlu mencakup empat aspek utama, yakni daya saing dasar (basic competitiveness), memberikan pengalaman unik (unique experience), bernilai tinggi (high value), dan memenuhi nilai-nilai berkelanjutan (sustainability).

Rancangan kebijakan ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya pengembangan indikator oleh Sekretariat Bersama dan disepakati menjadi salah satu acuan untuk mengukur penerapan aspek-aspek pariwisata berkualitas di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

2) Rancangan Kebijakan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tujuan penyusunan rancangan kebijakan ini adalah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait perlunya melakukan lompatan dari perekonomian yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam dan pertanian, industri, teknologi informasi menjadi perekonomian yang digerakkan oleh industri kreatif. Dalam menyusun rancangan kebijakan ini, telah dilakukan serangkaian koordinasi dan pengendalian atas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan gerakan gotong royong di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan rapat tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, disepakati perlunya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan digitalisasi UMKM/IKM/Artisan Indonesia melalui onboarding ke dalam ekosistem digital. Dengan mendorong UMKM/IKM/Artisan onboarding ke dalam ekosistem digital, diharapkan dapat mendorong perluasan pasar

para pelaku usaha dalam negeri dan mendorong peningkatan transaksi penjualan produk lokal. Hal ini menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu pelaku UMKM/IKM/Artisan mengembangkan usahanya melalui industri digital. Gerakan ini juga mendorong masyarakat sebagai konsumen untuk lebih bangga membeli dan menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kontribusi terhadap PDB Indonesia.

Secara resmi, Gernas BBI diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 dengan target awal yaitu peningkatan sebesar 2 juta unit UMKM/IKM/Artisan onboarding ke e-commerce hingga Desember 2020. Selanjutnya, target Gernas BBI ditingkatkan menjadi sebesar 30 juta unit UMKM/IKM/Artisan onboarding ke dalam ekosistem digital hingga 2024.

Adapun kendala dan hambatan yang berkembang saat ini yaitu terjadinya penurunan rata - rata jumlah onboarding UMKM/IKM/Artisan yang semula 400 ribu per bulan menjadi hanya 200 ribu per bulan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui optimalisasi dukungan teknis K/L dan Pemda untuk melaksanakan reaktivasi Gernas BBI di beberapa provinsi. Selain itu, diperlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dengan pengembangan UMKM/IKM/Artisan dengan penguatan konsep Gernas BBI 2023 diantaranya: usulan Surat Edaran dan Radiogram dari Kemendagri, penyusunan Buku BBI dan Pedoman Pelaksanaan Gernas BBI.

Per Desember 2023, jumlah UMKM/IKM/Artisan yang onboarding mencapai 17,292,701 unit. Artinya total UMKM/IKM/Artisan yang onboarding telah mencapai 25,292,701 unit. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 216,16% dari angka awal onboarding ketika Gernas BBI diluncurkan. Hal ini belum termasuk ke e-katalog LKPP. Namun demikian, terdapat penurunan dari laju pertumbuhan onboarding pada 2023 dibandingkan 2022 dari rata-rata 500 ribu menjadi 200 ribu unit per bulan.

Arah pelaksanaan Gernas BBI 2024 adalah pendalaman, penajaman, penguatan peran pemangku kepentingan serta penekanan dalam aspek keberlanjutan dari setiap tahapan skema kampanye. Adapun skema

pelaksanaan Gernas BBI 2024 di daerah akan mengacu pada konsep “Produk Lokal Naik Kelas” dan terdiri dari:

- a. Pendataan dan kurasi;
- b. Pembukaan/opening;
- c. Pendampingan;
- d. Media campaign;
- e. Pameran; dan
- f. Penutupan/harvesting yang disesuaikan dengan HUT daerah.

3) Rancangan Kebijakan Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Program penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sinkronisasi, koordinasi, pengendalian kebijakan investasi parekraf dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif sehingga meningkatkan realisasi investasi parekraf. Pelaksanaan percepatan realisasi investasi berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta memperkuat koordinasi teknis instansi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah/BUMN/swasta dalam kesesuaian tujuan realisasi investasi. Realisasi investasi dan permodalan perlu sinergi dengan konsep berkelanjutan antara lain kesesuaian investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tahapan perizinan dasar seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sebagainya.

Pada 2021 (penilaian setiap 2 tahun sekali), skor Travel and Tourism Development Index (TTDI) Indonesia meningkat dari 4,2 ke 4,4, serta

peningkatan peringkat dari 44 ke 32. Untuk pertama kalinya peringkat Indonesia lebih tinggi dibanding Thailand dan Malaysia. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam meyakinkan calon investor untuk meningkatkan nilai penanaman modal baik domestik maupun asing. Sejauh ini, realisasi investasi sektor parekraf mencapai Rp 5,31 triliun pada 2023. Pemerintah perlu mengoptimalkan iklim investasi Pariwisata di Indonesia, antara lain percepatan proses perizinan dasar investasi, insentif investasi termasuk skema pembiayaan yang mendorong terealisasinya perencanaan investasi.

Indonesia perlu menciptakan iklim investasi kondusif, yang membuat investor nyaman dan terus kembali ke Indonesia, mengurangi konflik, memberikan kemudahan-kemudahan yang juga memperhatikan aspek daya dukung lingkungan dan kearifan lokal. Kementerian Parekraf juga bersama Kementerian Investasi/BKPM dan Pemda didorong untuk meningkatkan Investment Project Ready to Offer (IPRO). Serta, Kementerian Investasi/BKPM bersama Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi percepatan realisasi investasi, serta memberikan insentif. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, investasi PMDN dan PMA pada sektor pariwisata mencapai 10.814 juta USD pada 2022. PMDN lebih mendominasi untuk investasi sektor pariwisata dalam 4 tahun terakhir.



Gambar 8. Grafik perkembangan investasi PMDN dan PMA pada sektor pariwisata di Indonesia (2017-2022)

Berdasarkan alternatif kebijakan yang telah disusun dan dikoordinasikan, dapat disusun rekomendasi sebagai berikut:

- a) Kementerian Parekraf, Kementerian Investasi/BKPM dan Pemerintah Daerah agar menyinergikan sistem data investasi di lima DPSP meliputi

kesepakatan Kabupaten/Kota di 5 DPSP, perluasan KBLI sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sistem analisis data, dan sistem pelaporan realisasi investasi Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;

- b) Berdasarkan data rilis BKPM dan Kemenparekraf, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pergerakan trend kenaikan dan penurunan investasi di lima DPSP merujuk antara lain (i) ketersediaan infrastruktur dasar, (ii) pelaksanaan event internasional, (iii) pengaruh geopolitik nasional dan internasional, dan (iv) hal pemicu dinamika investasi lainnya paling lambat pada min. Hasil analisis ini akan dijadikan salah satu pertimbangan pengambilan kebijakan optimalisasi realisasi investasi sektor Parekraf dan disampaikan pada Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Semester II pada Desember 2023;
- c) Perlu disusun daftar investor potensial dari lima negara kontributor PMA tertinggi sebagai bahan review target realisasi investasi dan penyebaran informasi bagi Pemerintah Pusat/Daerah di 5 DPSP;
- d) Perlu penyelesaian segera permasalahan lahan dan tata ruang investasi Parekraf berdasarkan mekanisme satgas anti mafia tanah, dan pengendalian pelaksanaan perusahaan sektor Parekraf di lima DPSP;
- e) Keterbatasan anggaran promosi pada lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penyusunan dokumen Investment Project ready to Offer (IPRO) dan promosi investasi, memerlukan sinergi promosi pada event nasional dan internasional antara Kementerian Pusat/Badan Otorita/BUMN dan Pemerintah Daerah; dan
- f) Kemenparekraf dan Kementerian Investasi/BKPM untuk melaksanakan rapat koordinasi teknis Pemerintah Daerah 5 DPSP, Badan Otorita dan BUMN terkait potensi penyusunan IPRO Parekraf, pendampingan dan sinergi promosi investasi pada TA. 2024.

Kombinasi kebijakan di atas dapat membantu meningkatkan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penting untuk mempertimbangkan kondisi lokal, karakteristik wilayah, serta melibatkan stakeholder terkait dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut.

4) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Di tengah maraknya gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan mendorong upaya meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), maka perlu adanya suatu bentuk perlindungan terhadap produk yang dihasilkan dari para pelaku ekonomi kreatif dan usaha pariwisata yang berasal dari kearifan lokal Indonesia dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata lokal dengan hastag “Bangga Berwisata di Indonesia aja”, melalui perlindungan kekayaan Intelektual. Produk atau hasil karya dari para pelaku ekonomi kreatif dan usaha pariwisata yang sudah memiliki perlindungan kekayaan intelektual perlu dikembangkan dan dikomersialisasikan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya para pelaku ekraf.

Untuk itu perlu adanya kolaborasi dan integrasi dari seluruh pihak instansi terkait yang saling bekerja sama secara pentahelik, bersinergi secara berkesinambungan untuk pengembangan kekayaan intelektual yang dapat melindungi produk hasil karya para pelaku industri kreatif dan usaha pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dari adanya pemalsuan dan pembajakan serta penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh yang bukan pemilik hak nya, sehingga meningkatkan nilai tambah keekonomian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Berdasarkan data WIPO, Indonesia mempunyai Ekonomi berpenghasilan menengah dengan pertumbuhan total R&D bisnis di tahun 2020 sebesar 1,4 persen. Seiring hasil WIPO tersebut dan dengan lahirnya PP No 24 Tahun 2022, membawa angin segar kepada para pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dimana Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akses pembiayaan kepada Lembaga keuangan bank maupun non bank. Sehingga diharapkan kedepannya dapat memberikan salah satu solusi bagi pelaku ekraf dalam meningkatkan kualitas produk dan inovasinya. Namun demikian masih banyak yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah untuk melengkapi

perangkat yang diperlukan guna pemberlakuan PP No 24 Tahun 2022, pada Tahun 2023 yaitu:

1. Penyiapan Platform Pendaftaran Penilai Kekayaan Intelektual (Pasal 12 ayat (3));
2. Penyiapan sistem pencatatan fasilitas pembiayaan pelaku ekonomi kreatif (pasal 13);
3. Pembentukan BLU (Badan Layanan Umum) pembiayaan dan Pemasaran (Pasal 37);
4. Penyediaan akses data atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan (pasal 11);
5. Penyusunan regulasi terkait disektor jasa keuangan;
6. Peningkatan kompetensi profesi penilai KI)pasal 12 ayat(4));
7. Penyiapan integrasi system elektronik antar K/L untuk mendukung pembiayaan dan pemasaran berbasis KI;
8. Penyediaan fasilitas sistem pemasaran berbasis KI; dan
9. Pemberian Insentif pada para pelaku Ekonomi Kreatif (pasal 33-35).

Untuk itu perlu terus dilakukan rapat koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan berbagai pihak instansi terkait dalam pengembangan Kekayaan Intelektual melalui komersialisasi sesuai dengan amanah yang tercantum dalam PP No 24 Tahun 2022 tersebut. Di Tahun 2023 ini perlu dikembangkan bentuk pengembangan kekayaan intelektual, khususnya sektor industri kreatif kerajinan dan jasa (Bali Spa, dan Craft Bali) serta pengembangan KI pada DPSP, Khususnya DPSP Borobudur.

Pada DPSP Borobudur, terdapat Sandal Upanat yang penting untuk dilakukan percepatan dalam perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu cara penyelamatan warisan dunia yang saat ini sedang mengalami kerusakan, dimana terdapat keausan pada batu Candi Borobudur. Berdasarkan Kajian dari Tim kajian Sandal Upanat Barabudur menyatakan bahwa persentase keausan rata rata batu penyusun struktur tangga pada sisi Timur adalah 74,40%. Persentase keausan rata rata batu penyusun struktur tangga pada sisi Barat dan Utara adalah 63,39% dan 27,84%. Sedangkan persentase keausan rata rata batu penyusun struktur tangga pada sisi Selatan adalah 30,96%, atau sekitar 3-5 cm.

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu:

- a. perlu diadakan rapat koordinasi dengan DJKI dan Ditjen AHU Kemenkumham terkait tanggapannya atas draf PKS (akses data KI dan akses data fidusia) yang telah dikirim oleh Kemenparekraf (Koordinator penyediaan akses data atas KI yang dijadikan objek jaminan);
- b. terkait dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), agar aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Koordinator penyiapan platform pendaftaran penilai KI dapat terintegrasi dengan platform yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan membuat baru;
- c. terkait dengan rencana pembentukan Pokja dalam penyediaan sistem manajemen kolektif digital untuk mendukung pembiayaan dan pemasaran berbasis KI, perlu diadakan rapat koordinasi untuk menentukan Kementerian yang akan menetapkan Pokja beranggotakan lintas K/L, yaitu Kemenparekraf, Kemenkumham dan LMKKN;
- d. Koordinator yang bertugas memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, agar dapat mengupayakan produk-produk berbasis KI masuk ke ekosistem pemerintah di e-katalog lokal dan sektoral;
- e. Koordinator yang bertugas dalam penyusunan bisnis proses, agar dapat menyusun peta bisnis yang juga memetakan stakeholder eksternal Kemenparekraf yang terkait untuk implementasi PP 24 tahun 2022; dan
- f. Sesuai dengan Bab II UU 24/2019 Pelaku Ekraf berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemda melalui Pengembangan Ekosistem Ekraf, Pasal 7 juga menyebutkan : “ Pemerintah dan/atau Pemda melakukan pengembangan Kapasitas pelaku Ekraf, Pasal 9 menyebutkan Pemerintah dan/atau Pemda bertanggungjawab dalam Pengembangan Ekosistem Ekraf, Serta pada pasal 10 menyebutkan Bahwa Pengembangan Ekosistem Ekraf dilakukan melalui : (a) pengembangan riset, (b) pengembangan Pendidikan, (c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, (d) Penyediaan Infrastruktur, (e) pengembangan sistem pemasaran, (f) pemberian insentif, (g) fasilitasi kekayaan intelektual, (h) perlindungan hasil kreativitas (Inventarisasi dan

Upaya Penyelesaian jika terdapat pelanggaran/sengketa KI, Khususnya pada Propinsi Jawa Tengah (20 Kabupaten dan 5 Kota

- g. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saat ini focus pada Komersialisasi atas KI Sandal Upanat Barabudur, karena telah memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya bentuk peraturan yang secara khusus mewajibkan Merek Sandal Upanat Barabudur yang saat ini dapat di gunakan untuk menaiki Candi Barabudur sebagai upaya pelestarian atas pelestarian warisan Dunia pada DPSP Borobudur, baik di keluarkan Oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek, dan/atau Peraturan lainnya yang bersifat Nasional guna kepentingan pelestarian Warisan Dunia.

5) Rancangan Kebijakan Pengembangan Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peran Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sangat penting dalam pengembangan kepariwisataan. Meningkatkan jumlah SDM pariwisata di Indonesia dalam segi kapasitas, kompetensi, mampu berdaya saing, dan berkarya masih menjadi salah isu prioritas yang perlu segera diselesaikan. Hal ini merujuk pada lima arahan Presiden RI pada pidato 2019, salah satunya adalah pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengundang talent global untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri. SDM yang unggul dan memiliki kompetensi yang baik, akan menggerakkan pembangunan pariwisata yang maju secara optimal dan berkelanjutan.

Pembangunan SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif perlu menjadi sebuah pilar baru, selain dari pilar yang sudah ada yakni destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan. Pembangunan SDM Pariwisata tidak hanya di level pemerintah namun juga di dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia menuju

tahun 2045 akan menjadi negara maju. Salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia adalah memiliki kualitas manusia yang unggul dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Dalam mewujudkan impian tersebut, maka salah satu poin dalam Visi Indonesia tahun 2045 adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemenko Marves bersama beberapa kementerian teknis yang terpilih, ikut menyusun dan merancang perencanaan dalam mengembangkan SDM pariwisata melalui buku Peta Jalan SDM Pariwisata Tahun 2025-2030. Telah disusun klasifikasi program kegiatan dan institusi yang ikut terlibat dengan sasaran yang disampaikan, sebagaimana terlampir pada gambar di bawah ini:

Gambar 9. Klasifikasi Pengembangan SDM Pariwisata 2025-2030

keterlibatan SDM di masing-masing daerah. Adapun perolehan jumlah data peserta per triwulan III 2023 yang mengikuti, rinciannya sebagai berikut:

- a) Pelatihan dilaksanakan oleh Kemenaker di BLK 5 DPSP, adapun rinciannya sebagai berikut (i) DPSP Danau Toba diikuti sebanyak 640 peserta; (ii) DPSP Borobudur diikuti sebanyak 2.288 peserta; (iii) DPSP Labuan Bajo diikuti sebanyak 480 peserta; (iv) DPSP Mandalika diikuti sebanyak 1.872 peserta; (v) DPSP Likupang diikuti sebanyak 912 peserta;
- b) Sertifikasi kompetensi pariwisata dilaksanakan oleh Kemenparekraf di 5 DPSP, adapun rinciannya sebagai berikut (i) DPSP Danau Toba diikuti sebanyak 1.750 peserta; (ii) DPSP Borobudur diikuti sebanyak 3.850 peserta; (iii) DPSP Labuan Bajo diikuti sebanyak 2.400 peserta; (iv) DPSP Mandalika diikuti sebanyak 1.400 peserta; dan (v) DPSP Likupang diikuti sebanyak 500 peserta; dan
- c) Sertifikasi kompetensi ekonomi kreatif dilaksanakan oleh Kemenparekraf di 2 DPSP, adapun rinciannya sebagai berikut (i) DPSP Labuan Bajo diikuti sebanyak 50 peserta; dan (ii) DPSP Mandalika diikuti sebanyak 150 peserta.

Pemberian kesempatan dan modal bagi SDM pariwisata di Indonesia untuk dapat berdaya saing ke luar negeri merupakan peluang besar. Salah satu wujudnya adalah pelaksanaan program magang ke luar negeri, khususnya di Malaysia bagi mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) telah lama dilakukan, namun sempat terhenti karena pandemi covid-19 yang berdampak ke seluruh dunia. Program magang merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh para mahasiswa, yang bertujuan antara lain (i) memberikan gambaran awal terkait dunia kerja, (ii) memberikan pengalaman kerja terkait jurusan yang digeluti para mahasiswa, dan (iii) meningkatkan mutu dan kualitas para mahasiswa di masa depan. Sebelumnya, pihak ketiga menjadi sarana penghubung antara Poltekpar dan pihak dunia industri, sehingga adanya permasalahan yang terjadi selama program magang berlangsung pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) belum mampu mengatasi langsung dan penyelesaian permasalahan menjadi lambat terselesaikan. Dampak pandemi covid-19 memberikan waktu untuk

mengevaluasi prosedur sebelumnya, sehingga Kemenko Marves bersama Kemenparekraf dan KJRI berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan tersebut.

Hasil kesepakatan bersama adalah mempermudah prosedur. Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makasar sebagai contoh yang telah mengimplementasikan kesepakatan dimaksud. Telah dilaksanakan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan General Manager dan Human Resource Manager Hotel yang berada di bawah naungan Care Luxury Hotels & Resorts. Kegiatan tersebut disaksikan oleh perwakilan dari KJRI di Johor Bahru. Poltekpar Makasar menyampaikan dengan adanya pembaharuan prosedur program magang setelah kondisi pandemi covid-19, memberikan peluang dan kesempatan bagi para mahasiswa, serta fasilitasi yang diberikan oleh KJRI mempermudah bagi Poltekpar untuk tidak lagi bergantung kepada pihak ketiga dan lebih aman. Upaya ini dapat diterapkan kepada Poltekpar lainnya yang akan melakukan program magang.

Pilihan kebijakan yang diambil, yakni Sosialisasi dan Penguatan Peran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Implementasi Buku Peta Jalan SDM Pariwisata Tahun 2025 - 2030. Upaya ini dapat menjadi panduan bagi pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat pengembangan SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

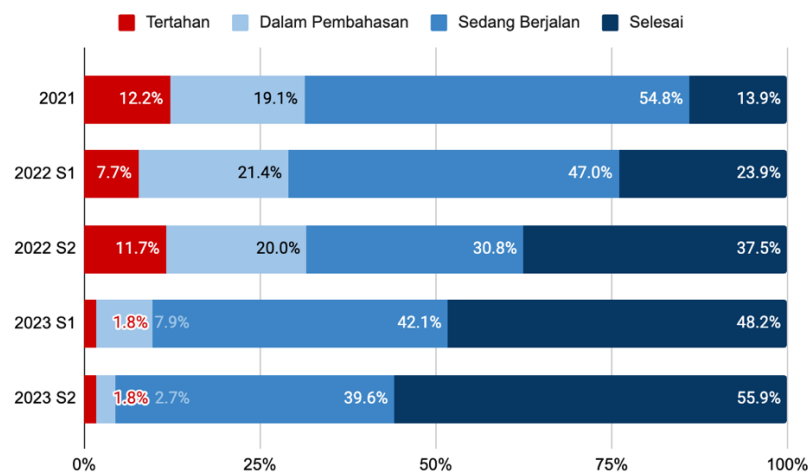
Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dan sinergitas program antara para pemangku kepentingan lainnya, sehingga terciptanya percepatan pelaksanaan program. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi ikut berperan aktif sebagai Koordinator, ikut berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut.

b. IK 4: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan

1) Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Arahan Presiden dalam pembangunan pariwisata di Indonesia adalah fokus pada pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Empat aspek utama pengembangan lima DPSP yang terus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya yaitu aksesibilitas dan konektivitas, amenitas, atraksi, dan fasilitas pendukung lainnya. Sejak 2020 hingga saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap isu-isu pengembangan lima DPSP khususnya pada 101 isu maupun tiga fokus percepatan penyelesaian isu.



Gambar 10. Status Perkembangan Lima DPSP 2021 – 2023

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan 101 isu lima DPSP, telah disusun kategori isu penyelesaian yang mencakup empat yaitu tertahan, dalam pembahasan, sedang berjalan, dan selesai. Untuk mengoptimalkan percepatan penyelesaian isu DPSP, setiap DPSP telah memfokuskan beberapa isu penyelesaian sebagai berikut:

a) Danau Toba

- 1) akselerasi pemenuhan pembiayaan, infrastruktur, promosi, dan sinergi antar daerah untuk penyelenggaraan event Aquabike
- 2) pembangunan infrastruktur dasar di lahan otorita
- 3) perubahan status lahan otorita BPODT menjadi KEK Danau Toba
- 4) percepatan pembangunan fasilitas pendukung Bandara Sibisa

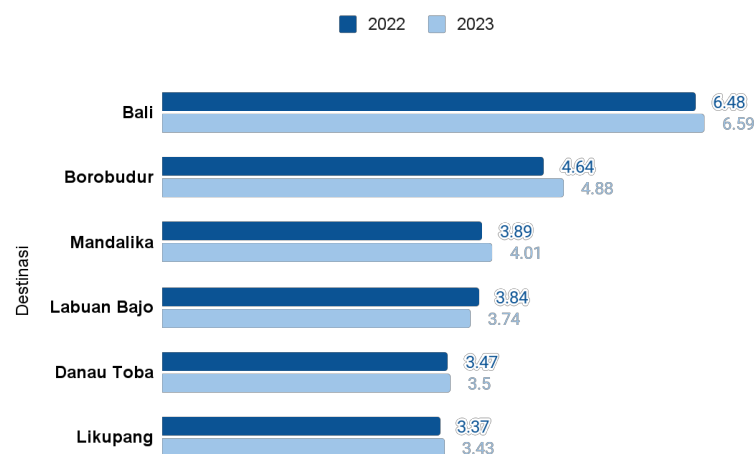
b) Borobudur

- 1) pengelolaan kawasan borobudur
- 2) lahan otoritatif BOB

- 3) pengelolaan sampah
- c) Mandalika
 - 1) pembangunan tujuh desa wisata
 - 2) Penyelesaian pengelolaan aset yang telah dibangun PUPR
- d) Labuan Bajo
 - 1) pembangunan tujuh desa wisata
 - 2) penyelesaian pengelolaan aset yang telah dibangun PUPR
- e) Likupang
 - 1) pembangunan infrastruktur jalan Pulau Bangka
 - 2) pembangunan pelabuhan multipurposes Pulau Bangka
 - 3) pembangunan atraksi Pulau Bangka

Fokus-fokus utama tersebut dan 101 isu DPSP masih dalam tahap penyelesaian atau sedang berjalan. Hingga 2023 semester II telah didapatkan isu sedang berjalan yaitu sebanyak 39,6%. Secara umum, isu yang masih berjalan meliputi infrastruktur dasar, pengelolaan aset dan kawasan dan pembangunan atraksi wisata.

Selanjutnya, capaian yang berhasil dilakukan dalam pengembangan lima DPSP adalah peningkatan persentase isu penyelesain yang hingga 2023 semester II telah diperoleh sebanyak 55,9%. Lebih lanjut, DPSP Danau Toba pada tahun 2023 juga berhasil telah menyelesaikan salah satu isu fokus yaitu akselerasi pemenuhan pembiayaan, infrastruktur, promosi, dan sinergi antar daerah untuk penyelenggaraan event Aquabike.



Gambar 11. Indeks Pariwisata Berkualitas Lima DPSP dan Bali

Lebih lanjut, capaian yang berhasil telah dilaksanakan pada pengembangan lima DPSP adalah peningkatan indeks pariwisata berkualitas. Tujuan utama dari pengembangan lima DPSP adalah terwujudnya lima destinasi pariwisata yang berkualitas yang salah satunya adalah dapat memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi secara berkelanjutan.

Namun demikian, ditemukan berbagai kendala dalam pengembangan lima DPSP seperti di antaranya:

- a) keterbatasan anggaran pengembangan pariwisata
- b) kurangnya awareness pemerintah daerah dan masyarakat dalam percepatan pembangunan dan pengelolaan kawasan
- c) kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam membangun lima destinasi pariwisata yang berkualitas
- d) kurangnya optimalnya kerja sama dan pelibatan badan usaha dalam pengembangan lima DPSP

Rekomendasi tindak lanjut dalam pengembangan lima DPSP yang perlu dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

- a) penyelesaian 32 isu yang terdiri dari, dua tindak lanjut isu tertahan, dua belas tindak lanjut isu yang perlu dilakukan penyesuaian target, dan sembilan tindak lanjut isu sedang berjalan;
- b) pembentukan dasar hukum tentang Indonesia Tourism Fund untuk pembiayaan event internasional di Lima DPSP dan wilayah lainnya;
- c) pembentukan dan penerapan peta jalan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d) usulan penambahan anggaran tiga Badan Pelaksana Otorita Pariwisata sebanyak Rp 1,24 Triliun pada APBN 2024

2) Janji Presiden Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia-BBI

Guna percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden RI Joko Widodo

(Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Terdapat lima capaian besar Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam merealisasikan program Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui anggaran belanja pemerintah. Capaian tersebut yakni:

- a. Nilai realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan BUMN mencapai Rp 762,7 Triliun. Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonominya di kisaran 1% yang mendukung capaian pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31%.
- b. Jumlah produk tayang di e-katalog mencapai 2,49 juta produk, melebihi target 1 juta.
- c. Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada Agustus 2022.
- d. Integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah telah selesai dilakukan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, integrasi ini dapat dilakukan antara sistem di Kemendagri, Kemenkeu, dan LKPP.
- e. Implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri menghemat anggaran sebesar Rp 1,8 Triliun.

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada 2023 guna pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Koordinasi pelaksanaan Business Matching Tahap V yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo
- b. Koordinasi pelaksanaan Gernas BBI/PDN dan BBWI 2023 di sembilan provinsi (Banten, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Papua Barat, Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bengkulu, dan DKI Jakarta).

Faktor pendukung untuk pencapaian target kinerja yaitu adanya arahan presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Kendala dalam pencapaian kinerja adalah:

- a. K/L masih belum mengupdate data realisasi sesuai waktu yang ditentukan.

- b. terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan di beberapa provinsi yang disesuaikan dengan hari jadi / ulang tahun provinsi atau kegiatan akbar tahunan lainnya.

Tindak lanjut dari pencapaian target kinerja ini antara lain:

- a. Melakukan koordinasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan ekosistem di bidang masing-masing dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gernas BBI pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Melakukan koordinasi dalam penyusunan roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju satu juta produk tayang dalam Katalog Elektronik.
- c. Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pengalokasian, dan realisasi paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- d. Melakukan koordinasi dalam pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400 triliun untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- e. Melakukan koordinasi guna pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada K/L dan pemda.
- f. Reward and punishment tambahan bagi K/L/Pemda yang tidak mencapai target belanja PDN minimal 95% dari anggaran barang dan jasa, 5 juta produk tayang di e-Katalog dan belanja sebesar Rp 500 Triliun dari e-Katalog.
- g. Memperbaiki proses bisnis dan dasar hukum kebijakan belanja PDN melalui perubahan penilaian TKDN dan percepatan pengesahan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik maksimal pada Agustus 2023 serta menyederhanakan berbagai regulasi termasuk pemberian insentif dan disinsentif.

- h. BUMN untuk melaksanakan peta jalan pengurangan impor dan menjadi ujung tombak pengembangan industri substitusi impor dalam negeri sebagaimana contoh baik yang dilakukan Kemenkes melalui “Roadmap Kemandirian Vaksin, Obat, dan Alat Kesehatan.
- i. Menyelesaikan integrasi sistem pengadaan belanja barang dan jasa.
- j. Memprioritaskan merek Indonesia dalam belanja K/L/Daerah, dan BUMN. Sepakat Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kemenkeu mengecek langsung ke lapangan terkait pentingnya e-Katalog.

Success story dari kinerja ini antara lain:

- a. Atas arahan Presiden Jokowi untuk mengajak masyarakat berwisata di Indonesia, telah diluncurkan program Bangga Berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022 dengan target 2023 sebesar 1,2 - 1,4 Miliar perjalanan. Dampak langsung adalah pendapatan pariwisata senilai kisaran Rp 3.200 Triliun.
- b. Temu Bisnis tahap 1 – 4 yang dilakukan oleh berbagai K/L terkait. Temu bisnis bertujuan untuk menjembatani K/L, pemda dengan industri dalam negeri, sehingga dapat mempercepat capaian target senilai Rp 400 Triliun

3) Janji Presiden Penyelesaian RUU Pengadaan Barang dan Jasa

Upaya untuk mendorong perilaku prioritas belanja produk dalam negeri memiliki dampak pada jangka menengah dan panjang, akan didukung pengesahan RUU Pengadaan Barang Jasa Publik yang merupakan salah satu implementasi Inpres 2/2022. RUU ini adalah bentuk nyata pelaksanaan komitmen Indonesia terhadap implementasi Konversi PBB Anti Korupsi. Sebagai salah satu negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Pasal 9 terkait Public Procurement and Management of Public Finances menggarisbawahi peranan masing-masing negara pihak untuk menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan efisien. Beberapa kegiatan mendukung akselerasi pengesahan RUU tersebut, yaitu:

- a. Audiensi dengan berbagai K/L terkait, pelaku usaha dan akademisi;
- b. Diskusi dan pembahasa bersama DPR; dan

- c. Studi banding implementasi RUU di negara lain yang sudah mengimplementasikan dengan baik.

Adapun rencana pelaksanaan penyusunan RUU PBJ Publik adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Agenda Pelaksanaan Penyusunan RUU PBJ Publik

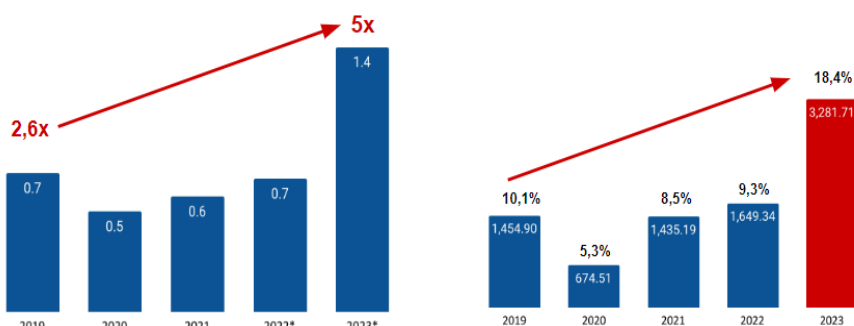
No	Agenda	Target Awal Waktu Pelaksanaan	Realisasi/ Target Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penetapan Persetujuan DPR	Desember 2022	Desember 2022	Tercapai Keputusan DPR Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023 Keputusan DPR Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023
2	Pembentukan Panitia Antar kementerian dan/atau antar non-kementerian	Februari 2023	Februari 2023	Tercapai SK Kepala LKPP Nomor 52 Tahun 2023 SK Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2023
3	Pembahasan PAK	Februari-Maret 2023	Maret-April 2023	Tercapai Dengan Catatan a. Memastikan Kembali hasil draf akhir kepada PAK b. Melakukan pembahasan dari kanal partisipasi publik
4	Penyelesaian dan Pelaporan PAK kepada Kepala LKPP	April 2023	April-Mei 2023	Belum Terlaksana
5	Paraf Anggota PAK	April 2023	Mei 2023	Belum Terlaksana (Dilaksanakan dalam bentuk acara koordinasi antara Kepala LKPP dengan anggota Tim PAK)

6	Penyelarasan dan Harmonisasi oleh Kemenkumham	April 2023	Mei 2023	Belum Terlaksana
7	Persetujuan Presiden	April 2023	Mei 2023	Belum Terlaksana
8	Pembahasan DPR	Juni 2023	Juni 2023	Belum Terlaksana

Sumber: LKPP, 2023

4) Arahan Presiden Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI)

Pada 29 September 2022, Presiden memberikan arahan untuk mengajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Kemudian Kemenko Marves bersama dengan K/L lainnya menginisiasi pembentukan program BBWI yang diluncurkan pada 13 Desember 2022 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung arahan presiden.



Gambar 12. Simulasi wisatawan nusantara dan dampak langsung terhadap PDB ADHB

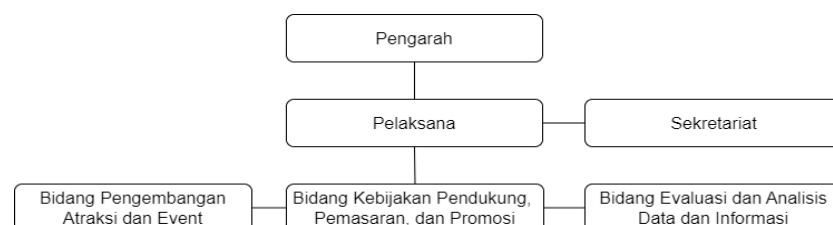
Data menunjukkan bahwa tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terdapat sebanyak 722 juta perjalanan wisatawan nusantara atau sekitar 2,6 kali perjalanan per penduduk per tahun. Jumlah perjalanan tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, jumlah perjalanan per penduduk per tahun di Indonesia dapat didorong hingga 4-5 kali perjalanan menjadi 1.2-1.4 miliar

perjalanan. Optimalisasi tersebut berpotensi akan menghasilkan pendapatan pariwisata senilai Rp 3.281 triliun atau setara dengan 18,4% PDB nominal.

BBWI akan fokus pada empat strategi utama yaitu kampanye masif, integrasi dengan promo paket wisata, ketersediaan transportasi efisien dan terjangkau, dan aspek keberlanjutan. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan pada 2023 untuk mendukung program BBWI antara lain:

1. Program BBWI terintegrasi dari K/L, industri, asosiasi, hingga masyarakat.
2. Kebijakan penambahan hari libur.
3. Pengembangan atraksi wisata berbasis sport tourism dan overland tourism dan pengembangan travel pattern daerah dan destinasi wisata daerah terkurasi.
4. Sumber data wisnus melalui Mobile Positioning Data (MPD) secara bulanan.
5. Pembentukan SK Tim Percepatan Program BBWI.

Penguatan BBWI juga dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja lintas sektor yang akan diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Saat ini draf SK sudah disampaikan kepada seluruh pihak-pihak terkait mulai dari pemerintah, industri, dan asosiasi. Tim akan terbagi dalam tiga bidang yaitu bidang pengembangan atraksi dan event, bidang kebijakan pendukung, pemasaran, dan promosi, dan bidang evaluasi dan analisis data dan informasi.



Gambar 13. Bagan Kelompok Kerja Program BBWI

3. Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini dimaksudkan untuk tercapainya target pembangunan kemaritiman melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

a. Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan terkait Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Berfokus pada RB General dan RB Tematik. RB General, yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dan terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. RB Tematik berfokus pada isu-isu prioritas presiden yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat ("Isu Hilir").

Pada aspek RB General, penanggung jawab pelaksanaannya adalah Sekretariat Kementerian Koordinator. Unit Kerja Eselon I lainnya bersifat dukungan kegiatan atas unsur-unsur penilaian pada RB General. Sepanjang tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mendukung pelaksanaan RB General yang dikoordinir oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, diantaranya adalah pengawasan kearsipan internal, pemenuhan arsitektur SPBE, penilaian pengadaan barang dan jasa, Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMPZI), SAKIP, dan SPIP.

Sesuai dengan konsep baru penilaian RB, tahun ini tidak lagi diselenggarakan Penilaian Mandiri RB (PMPRB) oleh Kementerian/Lembaga.

Oleh karena itu, capaian sasaran program dengan indikator kinerja nilai PMPRB ini menggunakan nilai PMPRB tahun 2022.

Pada aspek RB Tematik, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan identifikasi program dan kegiatan yang diusulkan sebagai Rencana Aksi RB Tematik 2023. Program dan kegiatan yang diusulkan sebagai berikut:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri;
- b. Prioritas Presiden: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Lima DPSP;
- c. Prioritas Presiden: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI); dan
- d. Prioritas Presiden: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

b. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves, penyelenggaraan sistem akuntabilitas Kemenko Marves meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Pada 2023 evaluasi SAKIP Kemenko Marves mengacu ke Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga terdapat penyesuaian pada bobot penilaian dan lembar kriteria evaluasi.

Berdasarkan evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat, nilai evaluasi tahun 2023 SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 74,80 dengan tingkat akuntabilitas "BB" atau "Sangat Baik". Adapun rincian nilai sebagai berikut:

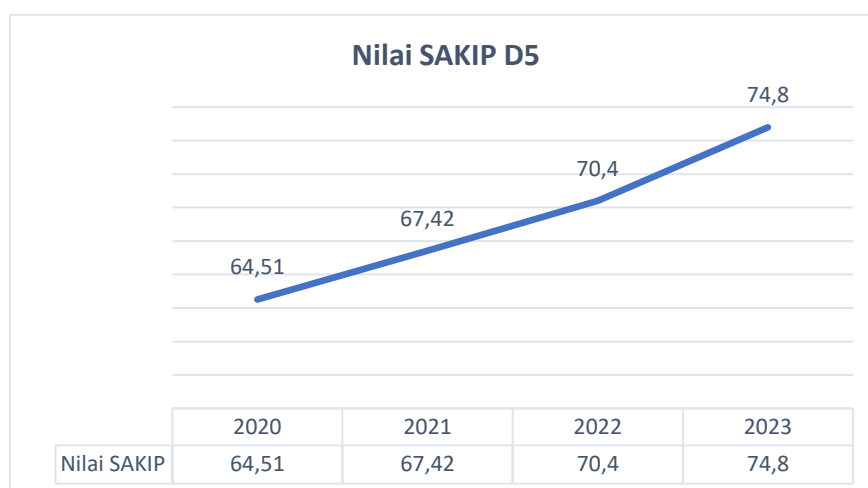
Tabel 16. Hasil Penilaian Internal SAKIP 2023

No	Komponen	Evaluasi AKIP 2023	
		Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30	23,40
3	Pelaporan Kinerja	25	18,25

4	Evaluasi Internal	15	10,35
Nilai Hasil Evaluasi			74,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber: LHE SAKIP 2023

Jika dibandingkan dalam empat tahun terakhir, nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami peningkatan secara bertahap. Hal ini merupakan hasil dari komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Adapun tren peningkatan nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak 2020-2023 sebagai berikut:



Gambar 14. Perkembangan Nilai SAKIP Deputy 5

Adapun rekomendasi perbaikan SAKIP tahun 2023 dari Tim Evaluator adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan pada penetapan target kinerja, agar memperhatikan capaian periode sebelumnya;
2. Laporan kinerja agar menyajikan informasi capaian yang bersifat outcome, memiliki data yang andal, perbandingan yang memadai dan memuat faktor pendukung dan penghambat atas capaian kinerja; dan
3. Pelaksanaan evaluasi internal agar dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan kinerja dan terdapat tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja 2023, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melaksanakan tugas tambahan dari Menko Marves yaitu mengoordinasikan percepatan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menginisiasi kegiatan The Asian Creative & Digital Economy Youth Summit (ACE-YS).

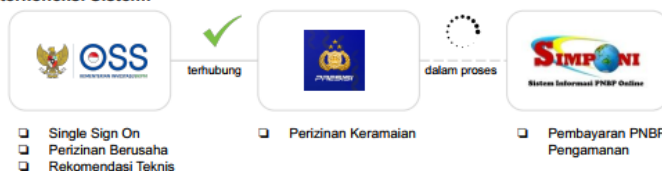
1. Koordinasi Percepatan Implementasi SPBE

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Ratas 12 Juni 2023 terkait dukungan percepatan transformasi digital dan Rata 1 Agustus 2023 terkait perizinan kegiatan seni dan olah raga, Kemenko Marves melalui Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengoordinasikan penyederhanaan aplikasi dan proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tujuh K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves dan perizinan penyelenggaraan event secara daring.

Permasalahan utama adalah inefisiensi birokrasi yang tercermin pada 'kesemrawutan' dengan adanya 1.222 aplikasi di tujuh K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves. Hal ini membuat kebingungan masyarakat, pemborosan APBN/APBD, dan ketidakpastian bagi investor. Adapun beberapa hal yang dihasilkan pada koordinasi percepatan transformasi digital di 7 K/L adalah integrasi layanan Government to Business (G2B) ke Online Single Submission (OSS), integrasi layanan Government to Citizen (G2C) ke Portal Indonesia Satu yang dikelola oleh Kemenkominfo dan KemenPAN-RB.

SPBE Tematik : Layanan Daring Penyelenggaraan Event

Interkoneksi Sistem:



- ❑ Single Sign On
- ❑ Perizinan Berusaha
- ❑ Rekomendasi Teknis

- ❑ Perizinan Keramaian

- ❑ Pembayaran PNPB Pengamanan

Capaian Kemajuan:

- Pengajuan perizinan event dapat dilakukan secara daring dengan visibilitas *progress tracking*.
- Event yang diselenggarakan di 5 venue uji coba, tidak perlu dilakukan pertemuan fisik untuk visitasi karena telah dilakukan penilaian oleh POLRI
- RPKM penetapan tarif perizinan Rp. 0 serta standarisasi tarif pengamanan sedang menunggu diundangkan
- Ranperpol MICE turunan PP 60 2017 sedang menunggu diundangkan
- Mekanisme pembayaran dilakukan secara *cashless*
- *Helpdesk* dan pengaduan tergabung dalam layanan dalam MPP Digital
- SLA pemrosesan perizinan dapat didorong menjadi 7 hari kerja

Durasi Perizinan:

Baseline :

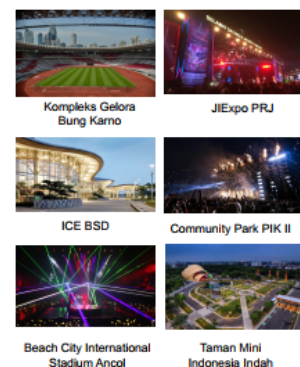
Amanat PP 60/2017 :

Arahan Presiden :

Estimasi Sistem Baru :

Gambar 15. Perizinan Penyelenggaraan Event

Venue Uji Coba



Selanjutnya pada penyederhanaan perizinan penyelenggaraan event secara daring, dihasilkan penyederhanaan dan digitalisasi proses bisnis serta integrasi layanan Presisi Polri ke dalam OSS, serta menggunakan layanan pembayaran Simponi Kemenkeu. Penyederhanaan ini menghasilkan proses bisnis yang lebih singkat dengan memangkas tahapan perizinan, mengurangi pengisian data dari 63 field menjadi 33 field, dan dari 9 dokumen menjadi 2 dokumen yang harus disampaikan oleh penyelenggara event.

2. The Asian Creative & Digital Economy Youth Summit (ACE-YS)



Gambar 16. Pembukaan Kegiatan ACE-YS oleh Menko Marves Ad Interim

ACE-YS merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong aksi kolektif di antara para kreator, pengusaha kreatif, pembuat kebijakan, komunitas, dan investor di Asia, serta mendorong ekonomi kreatif dan digital yang dinamis dan berkelanjutan dengan fokus

husus pada Asia Tenggara pada tahun perdana penyelenggaraannya. ACE-YS diselenggarakan pada tanggal 28-29 Oktober 2023 di Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini dibuka langsung oleh Menko Marves Ad Interim serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Mengusung slogan "New Waves from the SEA", ACE-YS bergerak untuk menjadi pusat aksi kolektif generasi muda untuk memetakan dan menghubungkan aktor-aktor industri kreatif dan digital di Asia dalam menavigasi peluang global yang diawali dari SEA (Southeast Asia). Pertemuan ini diharapkan dapat mempromosikan perekonomian kreatif dan digital yang suportif dan berkelanjutan di Asia dengan merangkul generasi muda dan bonus demografi di kawasan

Selain public event yang terbuka untuk umum dan conference, ACE YS juga menghadirkan creative catalysts yang mengumpulkan ratusan profesional muda ekonomi kreatif dari ASEAN, Cina, Jepang dan Korea Selatan (ASEAN+3) yang berusia antara 18-35 tahun, diajak untuk berkumpul, berbagi pengalaman serta memecahkan masalah dengan harapan bisa mendorong akselerasi pertumbuhan

ekonomi kreatif.

E. Analisis Kondisi Sumber Daya Pegawai

Hingga akhir tahun 2023, total pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berjumlah 57 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Jabatan	Jumlah
1	Pimpinan Tinggi Madya	1 orang
2	Pimpinan Tinggi Pratama	3 orang
3	Fungsional Ahli Madya	11 orang
4	Fungsional Ahli Muda	1 orang
5	Fungsional Ahli Pertama	6 orang
6	Pelaksana	16 orang
7	Tenaga Pendukung Menko	2 orang
8	Tenaga Kerja Kontrak	9 orang
9	Tenaga Pendukung Biro Umum	8 orang
Total		57 orang

Jumlah pegawai di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan yang paling sedikit dibandingkan dengan Unit Kerja Eselon I lainnya di Kemenko Marves. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerapkan sistem kerja kolaboratif lintas unit kerja, sehingga dimungkinkan suatu isu dikerjakan oleh tim yang berasal dari beberapa unit kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja.

Adapun jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masih kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) adalah Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan perpanjangan masa penugasan Tenaga Pendukung Deputy dari Bank Indonesia atas nama Evy Maya Deswita Siburian melalui Kepmenko Nomor 20 Tahun 2023. Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melakukan kerja sama dengan PT Espay Debit Indonesia Koe (PT EDIK/Dana) melalui Perjanjian

Kerja Sama (PKS) tentang Penugasan Karyawan PT EDIK di Kemenko Marves pada tanggal 9 Maret 2023. Pegawai dimaksud atas nama Citra Handayani Nasruddin dengan masa penugasan selama satu tahun (hingga 5 Maret 2024). Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melakukan kerja sama dengan Tony Blair Institute (TBI) dalam percepatan implementasi SPBE K/L di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan menugaskan karyawan TBI an Husein Muhammad, Maylvin Andrian Eridani, dan Ikhsan Nur Istyanto mulai April hingga Oktober 2023.

Pada triwulan II tahun 2023 terdapat pegawai Sekretariat Kementerian Koordinator yang pindah ke Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, pada triwulan III tahun 2023 salah satu pegawai tersebut, yakni Rima Hasanah menyatakan resign dari Kemenko Marves karena pindah ke instansi lain. Adapun data pegawai yang masuk sebagai berikut:

Tabel 18. Daftar Pegawai Baru Deputi 5

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Rima Hasanah	198907312012122001	Analisis Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual
2	Lita Suci Oktavianingsih	199510052019012002	Penyusun Laporan Keuangan

F. Analisis Sumber Daya Anggaran

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2023 sebesar Rp16.758.329.233 (99,95%) dari pagu sebesar Rp16.767.416.000. Adapun rincian realisasi per Unit Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Anggaran Triwulan IV 2023

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Deputi 5	16.767.416.000	16.758.329.233	9.086.767	99.95%
Asdep 1	2.036.997.000	2.036.683.635	313.365	99.98%
Asdep 2	2.102.327.000	2.101.979.211	347.789	99.98%
Asdep 3	1.755.436.000	1.755.262.072	173.928	99.99%
Asdep 4	1.832.735.000	1.832.557.332	177.668	99.99%
Asdep 5	1.659.548.000	1.659.306.671	241.329	99.99%

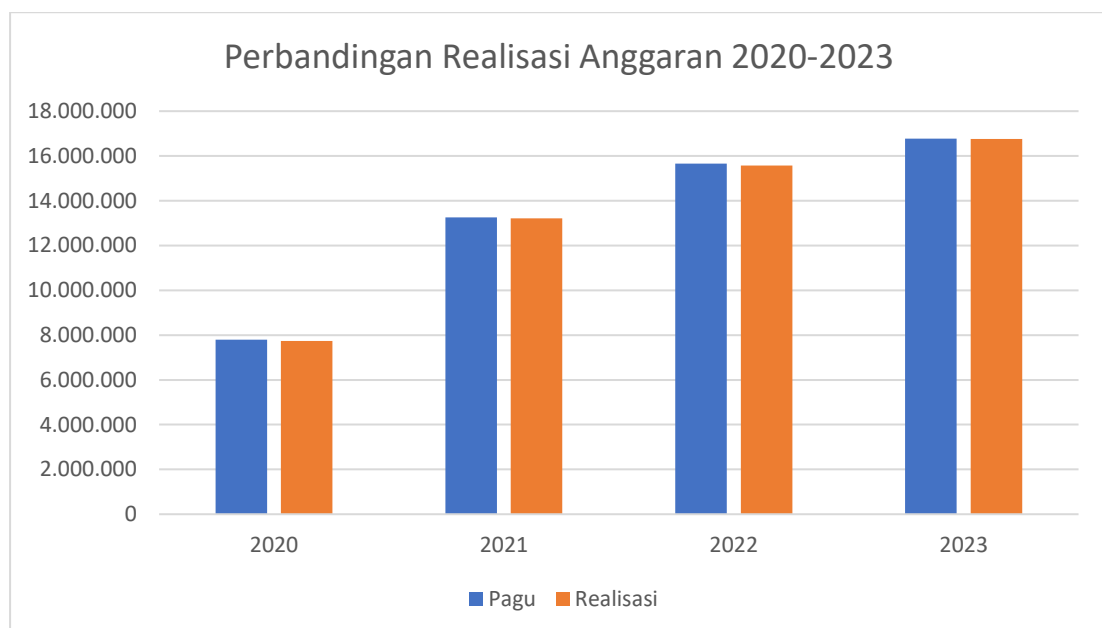
RO 6	4.047.397.000	4.042.504.501	4.892.499	99.88%
Sesdep	2.065.162.000	2.063.396.997	1.765.003	99.91%

Jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya, yakni tahun 2020-2022, terdapat peningkatan pagu dan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023, setelah sebelumnya mengalami penurunan realisasi anggaran pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran pada 2023 dilakukan secara optimal untuk menghasilkan output. Pada 2022 terjadi penurunan realisasi anggaran karena adanya pembukaan blokir Automatic Adjustment dan persetujuan Anggaran Belanja Tambahan menjelang akhir tahun. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyerap anggaran dalam waktu singkat.

Tabel 20. Pagu dan Realisasi Anggaran 2020-2023

TAHUN	2020	2021	2022	2023
PAGU*	7.800.000	13.251.972	15.661.698	16.767.416
REALISASI*	7.735.232	13.211.945	15.572.642	16.758.329
%	99.20%	99.70%	99.43%	99.95%

*Dalam ribuan



Gambar 17. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 2020-2023

G. Efisiensi Sumber Daya

Selama 2023, berbagai upaya telah dilakukan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk efisiensi sumber daya, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi secara daring, tercatat dalam sehari bisa dilakukan lima sampai sepuluh agenda rapat koordinasi dengan K/L.
2. Pengaturan jadwal penggunaan akun zoom secara terpusat, sehingga total Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya memiliki tiga akun zoom yang dapat digunakan secara maksimal. Hal ini cukup menghemat anggaran jika dibandingkan dengan unit lain yang masing-masing unit eselon 2 memiliki satu akun zoom.
3. Jumlah pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jika dibandingkan dengan unit lain termasuk paling sedikit, namun dengan jumlah sedikit dapat menghasilkan output yang sama dengan unit lain. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah membangun Tim Kerja lintas Unit Kerja.
4. Aktif mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan atau pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga atau stakeholder lain, baik secara luring maupun daring.
5. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga rutin melakukan kegiatan kerja bakti dalam rangka pemeliharaan ruangan kerja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 2023 terdapat beberapa sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022 yang tidak digunakan lagi. Dari 10 Sasaran Strategis dan 13 IKU pada dokumen PK Tahun 2022 menjadi tiga Sasaran Program dan enam Indikator Kinerja pada dokumen PK Tahun 2023.
2. Capaian target indikator Sasaran Program 1: Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing, Indikator 1: Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata dengan capaian 120% dan Indikator 2: Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/ Lembaga, Pemda, dan BUMN dengan capaian 120%. Capaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas telah mencapai target dan Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien dengan indikator Nilai SAKIP memperoleh capaian 105% dari target yang ditetapkan.
3. Realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 sebesar Rp16.758.329.233 atau mencapai 99,95% dari pagu sebesar Rp16.767.416.000. Realisasi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yakni sebesar 99,43%.
4. Berdasarkan perhitungan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2023 sebesar 109,83%. Hal ini menunjukkan secara kuantitatif seluruh target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah tercapai dan melebihi target.
5. Adanya peningkatan capaian pada indikator kinerja yang sama dengan tahun 2022 yakni nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari 70,4 pada 2022 menjadi 74,8 pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja.

B. Langkah Perbaikan Kedepan

Untuk perbaikan di masa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dengan K/L dan instansi terkait yang berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam peningkatan kinerja dan kualitas capaian kinerja dengan pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang, dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.
2. Melaksanakan monitoring dan secara berkala terhadap capaian kinerja yang ditargetkan pada periode berikutnya.
3. Melakukan penajaman dan pengawasan pada program prioritas yang tercantum pada RPJMN, Major Project, dan Janji Presiden pada akhir periode Kabinet Indonesia Maju di 2024.
4. Menggunakan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 untuk perbaikan strategi dalam pencapaian target tahun berikutnya.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Odo R.M. Manuhutu
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2023

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

 Odo R.M. Manuhutu

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

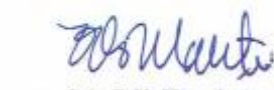
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SS.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing	1	Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata	3%
		2	Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN	Rp950 T
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas	3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti	100%
		4	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	80%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	5	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%
		6	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	71

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp13.300.000.000
2	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Rp2.200.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp15.500.000.000

Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi RI


Luhut B. Pandjaitan

Jakarta, Februari 2023
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

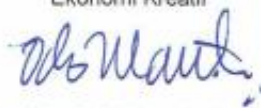

Odo R.M. Manuhutu

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1	Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata	Nilai Pertumbuhan PDB Kemaritiman Klaster Pariwisata				√
2	Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga dan Pemda	Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga dan Pemda				√
3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditindaklanjuti	1. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di DPSP	√	√	√	√
		2. Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√
		3. Rekomendasi Kebijakan Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√
		4. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√
		5. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√
4	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	1. Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	√	√	√	√
		2. Janji Presiden Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia-BBI	√	√	√	√
		3. Janji Presiden Penyelesaian RUU Pengadaan Barang dan Jasa	√	√	√	√
		4. Arahkan Presiden Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)	√	√	√	√
5	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				√
6	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				√

Jakarta, Februari 2023
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif


Odo R.M. Manuhutu